

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali . 2005. Keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Menguak Tabir Hukum, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Edisi kedua . Jakarta. Kencana. . Bogor. Ghalia Indonesia
- Achmad Ali dan wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum, Jakarta. Prenadamedia Group.
- Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana, Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia Edisi 1. Jakarta. Rajawali Pers
- Ahmad Mujahidin. 2007. Peradilan Satu Atap di Indonesia. Bandung. Refika Aditama
- Ahmad Khoirul Umam. 2006. Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia. Semarang. Rasail.
- Ali zaidan. 2007. Bunga rampai Komisi Yudisial. Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan.
- Amran Suadi. 2018. Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum. Jakarta Prenadamedia Group
- Andi Zainal Abidin. 2018. Hukum Pidana 1, Bunga rampai Komisi Yudisial, Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana.. Cetakan ke Lima. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyo. 2004. Aktualita Hukum dalam Era Reformasi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung. Mandar Maju.
- David Estlund. 2012. The Oxfoord Handbook of Political Phloshophy. Newyork. Oxford University Press
- Eddy O.S. Hiarij 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan Pertama, .Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum). Bandung Refika.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia.
- Heru Nugroho. 2001. Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Ismu Gunadi, dan Jonaedi effendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta. PT Prestasi Pustakaraya.
- Jimly Asshidiqie. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali pers. Jakarta.

- L. Sumartini. 2004. Money Politics dalam Pemilu. Jakarta. Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Lawrence M Friedman. *Law and Society An Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Lilik Mulyadi. 2003. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Moh Mahfud. 2020. Politik Hukum Di Inndonesia. Cetakan 10. Depok. Rajawali Press.
- Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan ke Sembilan. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mukti Fajar Nurdewata. 2010. "Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris". Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Muhammad Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk, Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan. Kreasi Wacana.
- Mukhlis, Tarmidzi, Ainal Hadi. 2018. Hukum Pidana. Edisi Revisi. Banda Aceh: Creative Bandar.
- Muladi dan Barda Nabawi Arif. 2010. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Cetakan ke 4. Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta. Kencana.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Cetakan ke 2. Jakarta. Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2005. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung. Sinar Biru.
- Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Pengantar Penelitian Hukum. Edisi 1. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. 2017. Hukum antara Sollen das Sein. Surabaya. UBHARA Press
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana* Jakarta Rajawali Pers
- Tjahjo Kumolo. 2015. Politik Hukum Pilkada Serentak. Cetakan 1. Jakarta. Mizan
- W.J.S Poerwadarminta. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Jurnal

- Anton Hutomo Sugiarto, Ismaya Dwi Agustina, Moch. Rijal. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019. Jurnal

Ilmu Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya. Volume 4 Number 1.

Anjelina Sitinjak. 2024. Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap praktek Kejahatan Money Politic pada Pemilihan Umum Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1. No. 3 April 2024

Audyna Mayasari Muin, Amir Ilyas, dan M. Khaerul. 2022. Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. Jurnal Living Law. Vol 14, No. 1.

Drispisy Teresa Pugon Sapni. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Netralitas ASN Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Fakultas Hukum Unstrat lex Administratium,2

Hanifah Putri Junaedi, dkk. 2024. Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang, (Money Politic) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. Vol 6. No 2

Inda Sari Palinrungi. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar. Volume 6 Nomor 1 Februari

Novrida Wulandari. 2020. Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara. Jurnal Humaniora. Vol 4, No 1.

Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Melinda Natasya, Christian robert Naibaho, Naomi olivia Br manurung. 2024. Pengaruh Tindakan Money politic Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Medan. Vol 09. No. 1.

Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanle, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Peidanaan. Halu Oleo Law Review. Volume 6, Isu 2. September 2022.

Tesis

Desi Amalia Anwar. 2021. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene, (tesis Universitas Hasanuddin)

Jumriani. 2023. Politik Hukum Penanganan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Tesis Universitas Hasanuddin Makassar

Muh Makir. 2024. Penegakan Hukum terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa. (Tesis Universitas Hasanuddin Makassar)

Artikel

Ahmad Muhaimin, 2024. Bawaslu Gowa Minta KASN Sanksi Berat ASN yang Lakukan Politik Uang. Sindomakassar.com, Kabupaten Gowa. Diambil dari : <https://sindomakassar.com/read/sulsel/7564/bawaslu-gowa-minta-kasn-sanksi-berat-asn-lakukan-politik-uang-1712293459> (diakses pada: 05 April 2024 14:04).

Busrang Riandy. 2023. ASN Tidak Netral, Terancam Hukuman Disiplin dan Pidana Pemilu. Kementrian Agama RI Provinsi Sulbar. <https://sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-diisipln-dan-pidana-pemilu-TVpAU> (Diakses pada: 22 oktober 2023)

KompasTV, 2024. Bawaslu Periksa 2 ASN, Diduga Dukung Caleg dan Capres. KompasTV, Kabupaten Gowa. Diambil dari: <https://www.kompas.tv/regional/478882/bawaslu-periksa-2-asn-diduga-dukung-caleg-dan-capres> (diakses pada : 22 Januari 2024).

M Chaidir Pratama (Staf Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan). 2024. Data Bawaslu Sulsel: 117 Oknum ASN Diduga Terlibat Pelanggaran Pilkada di Sulsel, 04 September.

Makalah atau Modul

Pusdiklat Kejaksaan RI. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Modul Pendidikan dan Pelatihan pembentukan Jaksa.

Ketentuan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara